

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Pelayanan di Setiap Kecamatan di Kota Sungai Penuh*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:

1. Hirarki Pusat Pelayanan Berdasarkan Jumlah Fasilitas (Skalogram)

Hasil analisis skalogram menunjukkan bahwa distribusi fasilitas pelayanan di Kota Sungai Penuh masih belum merata. Kecamatan Sungai Penuh berada pada orde I dengan 29 unit fasilitas sebagai pusat pelayanan utama. Kecamatan Sungai Bungkal menempati orde II dengan 23 unit fasilitas, sedangkan Kecamatan Pondok Tinggi berada pada orde III dengan 20 unit fasilitas. Adapun Kecamatan Pesisir Bukit (17 unit), Kumun Debai (16 unit), Tanah Kampung (16 unit), Hamparan Rawang (14 unit), dan Koto Baru (14 unit) berada pada orde IV dengan peran pelayanan yang relatif terbatas.

2. Klasifikasi Kecamatan dengan Tipologi Klassen

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen, wilayah Kota Sungai Penuh terbagi ke dalam dua kuadran, yaitu:

- Kuadran I (Wilayah Maju dan Berkembang Cepat): Terdiri dari Kecamatan Sungai Penuh, Pondok Tinggi, dan Sungai Bungkal. Wilayah ini memiliki kinerja pelayanan yang unggul dengan jumlah fasilitas dan penduduk di atas rata-rata kota, sehingga menjadi prioritas utama dalam penguatan peran pusat pertumbuhan.
- Kuadran III (Wilayah Berkembang Potensial): Meliputi Kecamatan Kumun Debai, Pesisir Bukit, Tanah Kampung, Hamparan Rawang, dan Koto Baru. Wilayah-wilayah ini memiliki jumlah fasilitas relatif rendah, tetapi ditopang oleh jumlah penduduk yang cukup besar sehingga masih berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan.

Tidak terdapat kecamatan yang masuk dalam Kuadran II maupun Kuadran IV, yang mengindikasikan bahwa karakteristik wilayah di Kota Sungai Penuh cenderung terbagi ke dalam dua kategori utama: wilayah yang telah berkembang pesat dan wilayah yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penetapan Kecamatan Sungai Penuh sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) dalam RTRW sejalan dengan hasil analisis tipologi Klassen. Namun, terdapat perbedaan dalam posisi kecamatan lainnya. Kecamatan Tanah Kampung, Hamparan Rawang, Pesisir Bukit, dan Kumun Debai berdasarkan analisis termasuk Kuadran III (berkembang potensial), tetapi dalam RTRW sudah ditetapkan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK). Perbedaan ini menunjukkan bahwa RTRW memiliki arah kebijakan yang lebih visioner, dengan memberikan peran strategis bagi kecamatan pinggiran untuk dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru, meskipun secara kondisi eksisting fasilitasnya masih terbatas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis tipologi Klassen memberikan gambaran faktual mengenai kondisi eksisting, sedangkan RTRW merepresentasikan arah kebijakan jangka panjang. Perbedaan keduanya mengindikasikan strategi pemerintah daerah untuk mendorong wilayah yang masih berkembang potensial agar mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan pelayanan baru di masa mendatang.

5.2 Saran

Merujuk pada hasil temuan dan kesimpulan penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peran pusat pelayanan utama (PPK). Kecamatan Sungai Penuh sebagai pusat pelayanan kota perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas serta kuantitas fasilitasnya, agar mampu memenuhi kebutuhan pelayanan seluruh wilayah kota secara optimal.
2. Peningkatan fasilitas di wilayah Kuadran III. Kecamatan Tanah Kampung, Hamparan Rawang, Pesisir Bukit, Kumun Debai, dan Koto Baru yang masih tergolong wilayah berkembang potensial perlu mendapat prioritas pembangunan fasilitas pelayanan dasar, sehingga sejalan dengan arah kebijakan RTRW yang menetapkan sebagian dari kecamatan tersebut sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK).
3. Pemerataan pembangunan antar kecamatan. Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu mendorong pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan,

agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu besar antara pusat kota dengan kecamatan pinggiran.

4. Integrasi hasil penelitian dengan kebijakan RTRW. Temuan dari analisis tipologi Klassen dapat menjadi masukan penting dalam perencanaan dan implementasi RTRW. Perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana kebijakan perlu dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah agar kebijakan yang visioner dapat diwujudkan secara bertahap.
5. Penelitian lanjutan. Penelitian ini masih terbatas pada jumlah fasilitas dan penduduk. Untuk penelitian berikutnya disarankan menambahkan indikator lain seperti aksesibilitas, jaringan transportasi, dan potensi ekonomi lokal, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pusat-pusat pertumbuhan pelayanan di Kota Sungai Penuh

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, E., & Rudiarto, I. (2020). Analisis hierarki pusat pelayanan berdasarkan teori tempat sentral Christaller di Kabupaten Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 16(2), 154–166.
- Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh. (2025). Kota Sungai Penuh dalam angka 2025. Sungai Penuh: BPS.
- Bintarto. (1977). *Interaksi desa-kota dan permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Bintarto. (1983). *Interaksi Desa dan Kota*. Ghalia Indonesia.
- Bourne, L. S. (2001). *Urban systems: Strategies for regulation and planning*. Oxford University Press.
- Christaller, W. (1933). *Die zentralen Orte in Süddeutschland: eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen*. Gustav Fischer, Jena.
- Conyers, D., & Hills, P. (1984). *Perencanaan sosial di dunia ketiga*. Gadjah Mada University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-4)*. Balai Pustaka.
- Ermawati. (2010). *Analisis penetapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah (Skripsi, Universitas Sebelas Maret)*.
- Fadli, R. (2017). *Perencanaan wilayah dan kota: Pendekatan konsep dan teori*. Prenadamedia Group.
- Farizal, F., Hidayanti, A., & Kuncoro, T. (2011). Penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pusat pertumbuhan (Studi kasus: Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 3(1), 1–12.
- Filipus, F., & Tondobala, R. (2019). Faktor penentu pusat pelayanan kota di Kecamatan Palu Timur. *Jurnal Ilmu Geografi*, 11(1), 1–12.
- Geovani, M. R., & Poluan, M. F. (2007). Pusat kota dan sub pusat pelayanan di Kota Manado. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 18(1), 55–63.
- Gulo, E. (2015). Analisis hierarki pusat pelayanan berdasarkan teori tempat sentral di Kabupaten Dairi. In *Jurnal Planesa* (Vol. 3, Issue 1).

- Hardati. (2016). *Geografi Perdesaan dan Perkotaan*. UNY Press.
- Hartono. (2007). *Teori lokasi dan pengembangan wilayah*. UGM Press.
- Januarman, A., Ahyuni, S., & Purwaningsih, D. (2018). Konsep teori pusat pertumbuhan dan aplikasinya pada pengembangan wilayah. *Jurnal Teknik PWK*, 7(1), 15–26.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2004). *SNI 03-1733-2004: Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional
- Klassen, L. H. (1963). *Quantitative methods in regional economic planning*. OECD.
- Maulina, F., Rudiarto, I., & Faqih, M. (2018). Kajian central place theory dalam sistem pelayanan sosial ekonomi. *Jurnal Teknik PWK Undip*, 7(4), 145–156.
- Mirsa, M. (2012). *Perkembangan kota dan permasalahannya*. Rajagrafindo Persada.
- Muta'ali, L. (2009). *Perencanaan Pembangunan Wilayah: Pendekatan Analisis Indeks*. Pustaka Pelajar.
- Muta'ali, L. (2015). *Teknik analisis regional untuk perencanaan wilayah, tata ruang dan lingkungan*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Nugroho, S. P. et al. (2004). *Pembangunan dan permasalahan wilayah*. LPFE UI.
- Pratama, B. (2018). *Analisis hierarki wilayah dan interaksi wilayah untuk penentuan pusat pelayanan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- Riduwan. (2005). *No Title: Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta.
- Riyadi, B. (2007). *Perencanaan wilayah dan kota di Indonesia*. ITB Press.
- Robinson, D. (2005). *Urbanization and development: Urban prospects in the 21st century*. Routledge.
- Rondinelli, D. A. (1985). *Applied methods of regional analysis: The spatial dimensions of development policy*. Westview Press.
- Rustiadi, E. (2009). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam era Otonomi*. Rajawali Pers.
- Soepono, B. (2000). *Teori ekonomi regional*. Bina Aksara.

- Soetomo, S. (2006). *Urbanisasi dan morfologi perkotaan*. ITS Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Tarigan, R. (2004). *Perencanaan pembangunan wilayah*. Bumi Aksara.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. (1987).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Utari, P. (2015). Penentuan hirarki wilayah berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan. *Jurnal Teknik PWK*, 5(2), 45–53.
- Utoyo, B. (2007). *No Title: Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia*.
- Wahyudi, I. (2013). *Analisis skalogram dalam perencanaan wilayah*. Gadjah Mada University Press.
- Wangsa et al. (2020). Studi persebaran fasilitas pemerintahan, sosial, dan ekonomi. *Jurnal Planologi*, 17(3), 101–110.
- Yuniningsih, T. (2020). Integrasi skalogram dan indeks sentralitas dalam tipologi Klassen untuk perencanaan pendidikan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 12(2), 119–130.